

Daftar Isi

Persepsi Publik atas Kinerja Multi Jalur Diplomasi Departemen Luar Negeri Republik Indonesia (2002–2007)	
Bima Arya Sugiarto & Peni Hanggarini	1–8
Model Pemberdayaan Masyarakat melalui Posdaya (Pos Pemberdayaan Keluarga)	
Pudji Muljono	9–16
Fungsi Desk Pilkada dan Model Pengelolaan Konflik Pilkada	
Wahyudi	17–26
Model Resolusi Konflik dan Pembentukan Negara: Pemahaman Budaya Hukum secara Holistik di Masyarakat Rawan Konflik	
Sri Endah Kinasih, Bambang Budiono, Sarkawi B. Husain	27–34
Contesting the Female Body, Modernity and Globalization	
Evi Eliyanah	35–41
Pergeseran Pengaruh dari Hindu ke Islam dalam Legenda Gunung Gong, Gunung Kelir, dan Banyu Anget	
Mochtar Lutfi	42–47
Budaya Nikah Siri di Rembang dalam Perspektif Gender	
Sukaryanto	48–55
Persepsi Masyarakat terhadap Kebijakan Reformasi Pelayanan Publik di Kota Semarang Tahun 2005–2008	
Dewi Erowati	56–62
Melihat Kasus Lapindo sebagai Bencana Sosial	
Anton Novenanto	63–75
Hyperconsumption, and 'One-Stop-Shopping' of the Cathedrals of Consumption: A Study of Architectural Sociology	
Tommy S.S. Eisenring	76–83

Model Pemberdayaan Masyarakat melalui Posdaya (Pos Pemberdayaan Keluarga)

Pudji Muljono¹

Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor

ABSTRACT

This research aims to observe the implementation of community empowerment through family empowerment program models that is an effort for social and economic development by systematically steps. The studied all family empowerment programs within the area of Bogor Agricultural University, in Bogor city, including Bogor regency, Cianjur and Sukabumi regency. Based on performance analysis and identification of problems in the management of family empowerment program, it can be arranged various of family empowerment program development action plan, i.e.: (1) the need for training to improve the quality of management family empowerment program; (2) resocialization of family empowerment program to all parties vertically and horizontally; (3) building productive business network to trigger the growth of economic business community; (4) learning and motivating the board and personnel of family empowerment program through study activities and benchmarking appeal to others; (5) the cooperative development of family empowerment program to develop the institution of community economic activities.

Key words: family empowerment program; community empowerment; poverty

Krisis ekonomi dan politik yang terjadi sejak akhir tahun 1997 telah menghancurkan struktur bangunan ekonomi dan pencapaian hasil pembangunan di bidang kesejahteraan sosial selama rezim orde baru (1967–1998). Salah satu penyebab terjadinya krisis tersebut adalah kenyataan bahwa meningkatnya angka statistik pertumbuhan ekonomi selama orde baru, tidak merefleksikan terjadinya pemerataan kesempatan dan perolehan kesejahteraan secara bermakna. Pembangunan ekonomi yang berorientasi pertumbuhan hanya melahirkan peningkatan kesejahteraan semu (yakni pada sekelompok kecil orang yang sangat kaya), namun tidak dapat dirasakan oleh mayoritas penduduk yang miskin.

Kondisi kesejahteraan sosial dewasa ini menunjukkan tingginya angka kemiskinan, angka pengangguran, angka putus sekolah, dan meningkatnya jumlah anak kekurangan gizi. Pada tahun 2009, sekitar 30 sampai 40 juta angkatan kerja menganggur atau bekerja secara tidak teratur. Laporan badan pusat statistik (BPS) pada bulan desember 2009 menunjukkan bahwa 37,4% warga negara Indonesia mengalami kemiskinan absolut (di bawah garis kemiskinan) dan sebanyak 20% yang lain sangat rentan jatuh kebawah garis kemiskinan. Semua bukti tersebut menjelaskan bahwa

pembangunan ekonomi di Indonesia selama ini ternyata mengalami distorsi (*distorted development*).

Menurut Midgley (2005), pembangunan yang terdistorsi adalah ketika pembangunan ekonomi tidak sejalan dengan, atau kurang berdampak pada peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat secara luas. Dengan kata lain, usaha pembangunan mengalami distorsi apabila keuntungan yang dicapai tidak mampu atau tidak diciptakan agar menyentuh dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan menurunkan jumlah orang miskin secara bermakna.

Peningkatan kualitas manusia sebagai sumber daya pembangunan merupakan prasyarat utama untuk memperbaiki derajat kesejahteraan rakyat. Tujuan utama pembangunan millenium atau *millenium development goals* (MDGs) di Indonesia, dengan prioritas pengentasan kemiskinan, menetapkan proporsi penduduk miskin pada tahun 2015 diturunkan menjadi setengahnya atau 8,2% dari jumlah penduduk. Dalam RPJM 2004–2009 sasaran itu dipercepat pencapaiannya pada tahun 2009. Keputusan itu merupakan tekad dan kebijaksanaan pemerintah yang perlu didukung semua instansi dan institusi pembangunan. Agar upaya itu berhasil dengan baik perlu diikuti pengembangan gerakan

¹ Korespondensi: Pudji Muljono, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, Jl Kamper Kampus IPB Darmaga Wing 1 Level 5, Telp/Fax 0251-8381215; HP 081311157644; email: pudji1962@yahoo.co.id

pemberdayaan keluarga yang dilaksanakan secara intensif (Suyono dan Rohadi 2007).

Berbagai program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah selama ini secara konseptual telah menggunakan konsep pemberdayaan. Meski tidak dapat dikatakan bahwa berbagai program tersebut kurang berhasil, namun paling tidak bahwa program tersebut telah berhasil terutama berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Mengacu pada kondisi bahwa berbagai program pengentasan kemiskinan yang dijalankan selama ini kurang dapat menjalankan fungsi sesuai dengan yang diharapkan, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji upaya pemberdayaan masyarakat melalui model pos pemberdayaan keluarga (posdaya) dengan sasaran keluarga miskin di wilayah kota Bogor, kabupaten Bogor, kabupaten Cianjur dan kabupaten Sukabumi.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan program pemberdayaan masyarakat khususnya bagi semua segmen usia dalam keluarga melalui model pos pemberdayaan keluarga (posdaya) dalam upaya pembangunan sosial dan ekonomi keluarga untuk pengentasan kemiskinan warga masyarakat secara sistematis.

Target khusus yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah: (1) menganalisis kinerja posdaya; (2) mengidentifikasi permasalahan dalam pengelolaan Posdaya; dan (3) menyusun rencana program aksi pengembangan posdaya.

Manfaat Penelitian

Kegunaan kajian adalah menghasilkan identifikasi permasalahan dalam pengelolaan Posdaya dan rencana program aksi pemberdayaan masyarakat miskin melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan modal sosial secara partisipatif. Hasil kajian dapat dikonstruksikan untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan di tempat atau lokasi di mana kajian ini dilaksanakan dan sebagai bahan replikasi bagi daerah-daerah atau wilayah yang akan mengembangkan masyarakat dan upaya mengentaskan kemiskinan melalui model Posdaya.

Tinjauan Pustaka

Pemberdayaan

Suharto (2005) mengungkapkan bahwa pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang/kelompok/masyarakat yang rentan dan lemah,

sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam: a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, kebodohan dan kesakitan; b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang memengaruhi mereka.

Ciri-ciri masyarakat yang telah berdaya menurut Sumarjo dan Saharuddin (2004) adalah sebagai berikut: a) mampu memahami diri dan potensinya; b) mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan kedepan) dan mengarahkan dirinya sendiri; c) memiliki kekuatan untuk berunding dan bekerja sama secara saling menguntungkan dengan "*bargaining power*" yang memadai; d) bertanggung jawab atas tindakan sendiri.

Berdasarkan konsep-konsep di atas, dari berbagai pengertian yang ada mengenai pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan masa depan sesuai dengan keinginan mereka.

Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu masalah dalam pembangunan yang ditandai oleh pengangguran dan keterbelakangan, yang kemudian menjadi ketimpangan. Masyarakat miskin pada umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi yang lebih tinggi. Menurut SMERU dalam Suharto (2005), kemiskinan memiliki beberapa ciri: 1) ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan dan papan); 2) ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi); 3) ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga); 4) kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massal; 5) rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber daya alam; 6) ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan; 7) ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan; 8) ketidakmampuan untuk berusaha; 9) ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial.

Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. World bank (2002) membagi dimensi kemiskinan ke dalam empat hal pokok, yaitu *lack of opportunity*, *low capabilities*, *low level security*, dan *low capacity*. Kemiskinan dikaitkan juga dengan keterbatasan hak-hak sosial, ekonomi, dan politik sehingga menyebabkan kerentanan, keterpurukan, dan ketidakberdayaan. Meskipun fenomena kemiskinan itu merupakan sesuatu yang kompleks dalam arti tidak hanya berkaitan dengan dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi-dimensi lain di luar ekonomi, namun selama ini kemiskinan lebih sering dikonsepsikan dalam konteks ketidakcukupan pendapatan dan harta (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan, yang semuanya berada dalam lingkungan dimensi ekonomi (Nanga 2006).

Indikator mengenai seseorang dikatakan miskin dapat direfleksikan sesuai dengan tingkat kemiskinan sesungguhnya di masyarakat. Menurut departemen sosial (2005) yang dimaksud keluarga miskin adalah mereka yang memiliki ciri berikut: (1) Penghasilan rendah, atau berada di bawah garis sangat miskin yang dapat diukur dari tingkat pengeluaran per-orang per-bulan berdasarkan standar BPS per wilayah provinsi dan kabupaten/kota; (2) Ketergantungan pada bantuan pangan untuk penduduk miskin (seperti zakat/beras untuk orang miskin/santunan sosial); (3) Keterbatasan kepemilikan pakaian untuk setiap anggota keluarga per tahun (hanya mampu memiliki 1 stel pakaian lengkap per orang per tahun); (4) Tidak mampu membiayai pengobatan jika ada salah satu anggota keluarga yang sakit; (5) Tidak mampu membiayai pendidikan dasar 9 tahun bagi anak-anaknya; (6) Tidak memiliki harta (aset) yang dapat dimanfaatkan hasilnya atau dijual untuk membiayai kebutuhan hidup selama tiga bulan atau dua kali batas garis sangat miskin; (7) Tinggal di rumah yang tidak layak huni; dan (8) Sulit memperoleh air bersih.

Indikator fakir miskin tersebut sifatnya multidimensi, artinya setiap keluarga miskin dapat berbeda tingkat kedalaman kemiskinannya. Secara umum jika tiga kriteria tersebut di atas terpenuhi, sudah dapat dikategorikan keluarga miskin.

Posdaya

Pos pemberdayaan keluarga (posdaya) adalah forum silaturahmi, advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan sekaligus bisa dikembangkan menjadi wasah koordinasi kegiatan penguatan fungsi-fungsi kekeluargaan secara terpadu (Suyono dan Rohadi 2007). Penguatan fungsi-fungsi utama tersebut diharapkan memungkinkan setiap keluarga makin mampu membangun dirinya menjadi keluarga sejahtera, keluarga yang mandiri dan keluarga yang sanggup menghadapi tantangan masa depan dengan lebih baik.

Posdaya merupakan gagasan baru guna menyambut anjuran pemerintah untuk membangun sumber daya manusia melalui partisipasi keluarga secara aktif. Proses pemberdayaan itu diprioritaskan pada peningkatan kemampuan keluarga untuk bekerja keras mengentaskan kebodohan, kemalasan dan kemiskinan dalam arti yang luas. Sasaran kegiatan yang dituju adalah terselenggarakannya upaya bersama agar setiap keluarga mempunyai kemampuan melaksanakan delapan fungsi keluarga.

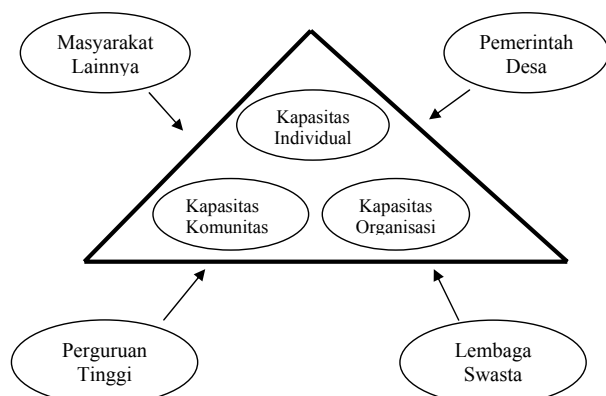
Dalam rangka pelaksanaan MDGs, pengembangan fungsi keluarga tersebut diarahkan kepada lima prioritas sasaran utama, yaitu komitmen pada pimpinan dan sesepuh tingkat desa dan pedukuhan, kecamatan dan kabupaten, pengembangan fungsi keagamaan, fungsi KB dan kesehatan, fungsi pendidikan, fungsi kewirausahaan dan fungsi lingkungan hidup yang memberi makna terhadap kehidupan keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Posdaya itu sendiri dapat dibentuk di antara kalangan keluarga maupun antar keluarga, sehingga posdaya dapat saja memiliki basis pribadi, basis kelompok, misalnya posdaya berbasis masjid, Posdaya berbasis tanaman, atau posdaya berbasis pendidikan, dan lainnya. Mengenai program utama posdaya terbagi dalam empat hal yang pokok yakni program pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan.

Kerangka Pemikiran

Pendekatan yang dapat digunakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan adalah melalui pendekatan dualistik yakni dengan mengubah klien dan mengubah

lingkungan dalam pemecahan masalah masyarakat yang bersangkutan. Secara skematis, pendekatan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1.

Kerangka Pemikiran tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan melalui Posdaya

Mengacu pada konsep pemberdayaan tersebut dapat dicermati bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Masyarakat miskin merupakan kelompok masyarakat yang rentan dan lemah serta tidak memiliki kekuatan dan kemampuan untuk berdaya. Melalui upaya pemberdayaan masyarakat diharapkan mereka dapat memiliki kemampuan dan kekuatan untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi mereka dan keluarganya sehingga terbebas dari kemiskinan (kondisi kebodohan, kelaparan dan kesakitan). Melalui upaya pemberdayaan diharapkan mereka juga dapat menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan bagi mereka untuk meningkatkan pendapatan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Metode Penelitian

Waktu dan Lokasi

Kajian ini merupakan penelitian eksploratif dengan menggunakan metoda survei terbatas pada lokasi yang menjadi objek penelitian. Lokasi penelitian adalah posdaya binaan IPB yang meliputi posdaya bina sejahtera, posdaya mandiri, posdaya giri mulya, posdaya benteng harapan, posdaya sirnagalih, posdaya An Nur dan posdaya melati. cakupan wilayah penelitian meliputi kota Bogor dan kabupaten Bogor, kabupaten Cianjur dan kabupaten

Sukabumi. Penelitian berlangsung selama 8 bulan, mulai bulan april hingga bulan november 2009.

Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer adalah berbagai data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari informan maupun responden di lapangan yang merupakan pengurus dan anggota posdaya. Data sekunder adalah berbagai data dan informasi yang diperoleh dari berbagai literatur maupun referensi yang terkait dengan tujuan dan sasaran penelitian, seperti laporan dan dokumen mengenai pemberdayaan keluarga dan masyarakat yang didapatkan dari sejumlah dinas dan instansi pemerintah.

Data tentang aspek kelembagaan dan profil posdaya diperoleh melalui kuesioner, wawancara, observasi dengan informan kunci yang merupakan pengelola masing-masing posdaya. Informasi tambahan diperoleh dari kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan kader serta anggota Posdaya yang dipilih secara acak berdasarkan latar belakang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Data mengenai potensi posdaya diperoleh melalui wawancara terstruktur dan persepsi dan aspirasi diperoleh melalui *focussed group discussion (FGD)*. Topik diskusi dalam FGD adalah hal-hal yang terkait dengan fokus kajian, mencakup kekuatan dan kelemahan posdaya, peluang dan tantangan yang dihadapi posdaya. Peserta FGD adalah para anggota dari masing-masing posdaya yang mewakili keragaman anggota posdaya berdasarkan aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Analisis Data

Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan maka penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Analisis dilakukan dengan metoda komparatif, yaitu membandingkan kondisi ideal dan kondisi riil di lapang, menggali pendapat-pendapat dari berbagai unsur yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Posdaya dilandasi dengan metode empiris.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Posdaya

Secara garis besar, gambaran umum tentang profil tujuh posdaya yang menjadi objek penelitian di wilayah kota Bogor, kabupaten Bogor, Cianjur dan Sukabumi tersaji pada Tabel 1. Berdasarkan

hasil FGD dengan pengurus posdaya diketahui bahwa penentuan kriteria keluarga miskin dari masing-masing posdaya itu berbeda satu sama lain. Namun demikian, secara umum dapat disimpulkan kriteria keluarga miskin yang digunakan oleh posdaya adalah sebagai berikut: (1) Ekonominya tidak mencukupi; (2) Makan sekali dalam sehari; (3) Pekerjaannya kuli panggul atau serabutan; (4) Rumah semi permanen; (5) Penghasilan tak menentu; (6) Luas rumah tidak mencukupi kebutuhan minimal; (7) Tidak mempunyai aset apapun; (8) Tidak bisa menyekolahkan anak.

Dalam upaya pengentasan kemiskinan warga di wilayah kerjanya, Posdaya menetapkan sasaran yang berupa keluarga miskin berdasarkan survei dan pendataan. Secara mudah, masyarakat menilai bahwa keluarga yang miskin adalah mereka yang saat ini menjadi penerima bantuan tunai langsung (BLT), dan penerima bantuan beras untuk keluarga miskin (raskin). Jumlah keluarga sasaran posdaya, jumlah keluarga miskin versi pengurus posdaya, jumlah keluarga miskin penerima bantuan tunai langsung (BLT), dan penerima beras untuk keluarga miskin (raskin) dapat dilihat pada Tabel 1.

Kinerja Posdaya

Analisis kinerja posdaya dimaksudkan untuk mengukur dampak keberadaan posdaya sebagai gerakan pemberdayaan masyarakat terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Secara umum kinerja posdaya termasuk kategori baik, karena posdaya telah menghasilkan beberapa perubahan sebagai berikut.

Pertama, Posdaya mampu memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap bentuk-bentuk intervensi pembangunan. Semula mereka mempersepsikan setiap intervensi luar terhadap masyarakat selalu bermakna pemberian bantuan, khususnya bantuan materi/dana. Tetapi setelah mereka mengenal posdaya, yang mengusung konsep keswadayaan, gotong royong dan kemandirian, mereka mulai memahami bahwa setiap intervensi luar ke masyarakat tidak selalu berkonotasi pemberian bantuan khususnya bantuan dana. Intervensi bisa berupa kegiatan sosial, intervensi ide, nilai-nilai, cara kerja pemberdayaan dan sebagainya. Bahkan posdaya juga mampu meningkatkan kepercayaan diri terhadap kemampuan diri warga bahwa mereka mampu berperan aktif untuk membangun. Selama

Tabel 1.
Profil Posdaya yang Menjadi Sasaran Penelitian

No.	Nama Posdaya	Lokasi	Tanggal Pembentukan	Program Unggulan	Jumlah KK			
					Sasaran Posdaya	Gakin	Penerima Raskin	Penerima BLT
1	Bina Sejahtera	Kampung Bojong Menteng, Kelurahan Pasir Mulya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	8 Mei 2007	PAUD, Posyandu Lansia, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Pembuatan Demplot Pertanian Terpadu, Perpustakaan Warga, Usaha Ekonomi Produktif	236	75	75	65
2	Mandiri	Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor	1 Agustus 2007	Posyandu, Perpustakaan, Pelatihan, LKM, Daur Ulang Sampah, Apotek Hidup	425	95	95	42
3	Benteng Harapan	Desa Benteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor	11 Januari 2008	PAUD, Taman Bacaan, Posyandu, Kursus Menjahit, Pemberdayaan Pedagang, Pembibitan Tanaman	400	150	300	140
4	Kenanga	Desa Girimulya, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor	2 Mei 2007	Pembinaan pedagang, Pemberantasan buta huruf, Posyandu, Bina Lansia, Kesehatan Reproduksi, Tanaman Obat dan Hias	159	88	27	27
5	Sirnagalih	Desa Sirnagalih Kecamatan Ciluku Kabupaten Cianjur	5 Februari 2008	PAUD, Taman Bacaan, Posyandu, Kursus Menjahit, Kompos, Pemberdayaan Pedagang	654	117	117	109
6	An-Nuur	Desa Galudra, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur	5 Februari 2008	PAUD, Taman Bacaan, Posyandu Balita, Kursus Lapangan, Jamur Tiram, Koperasi	136	136	136	136
7	Melati	Desa Nagraksari, Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi	7 Februari 2008	Koperasi Simpan Pinjam, Kompos, Paket A, Pelatihan Remaja, Budidaya Lidah Buaya dan Pengolahannya	56	56	56	56

ini warga pada umumnya lebih banyak berperan sebagai sasaran pembangunan, tetapi setelah terlibat dalam Posdaya, warga lebih banyak berperan sebagai perancang, pelaksana dan pengevaluasi program-program pembangunan di wilayahnya.

Kedua, posdaya mampu mendinamisasikan kehidupan masyarakat melalui meningkatnya partisipasi dan komitmen masyarakat dalam pembangunan. Sebelum adanya posdaya, jumlah masyarakat yang terlibat dalam pembangunan, baik sebagai penerima/sasaran program maupun sebagai kader relatif sedikit. Setelah terbentuknya posdaya, semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan posdaya maupun yang memberikan layanan kepada masyarakat melalui posdaya. Selain itu, semakin banyak pula warga masyarakat yang mau menjadi kader posdaya. Warga yang semula kurang aktif dan cenderung tidak peduli dengan lingkungan, kini mulai "terusik" dengan keberadaan posdaya. Saat ini partisipasi masyarakat lebih banyak berupa partisipasi tenaga dan waktu, bukan dalam bentuk dana atau materi. Hal ini bisa dipahami karena kondisi ekonomi sehari-hari yang relatif rendah.

Ketiga, kualitas keluarga miskin yang berada di wilayah kerja posdaya mengalami perubahan yang cukup signifikan setelah posdaya terbentuk. Indikator perubahan kualitas tersebut antara lain: 1) posdaya mampu mengubah *mindset* (cara pandang) gakin yang semula menilai rendah terhadap pendidikan menjadi gakin yang menilai penting terhadap pendidikan; 2) berani mengemukakan ide-ide perubahan pada saat musyawarah; 3) menilai penting kesehatan dengan rutin mengunjungi posyandu, posbindu sebagai bagian kegiatan posdaya; 4) jumlah balita kurang gizi berkurang.

Keempat, mulai muncul kegiatan ekonomi di masyarakat, seperti munculnya usaha kecil di bidang pangan, kerajinan maupun jasa. Sebagai contoh usaha jus jambu biji merah, aneka keripik, budidaya jamur, keripik jamur, telur asin, cinderamata dan lain-lain. Usaha tersebut semula tidak ada, setelah terbentuk posdaya, warga tergerak untuk kreatif mencari tambahan penghasilan.

Kelima, masyarakat mulai menilai pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan dengan memulai upaya mengolah sampah rumah tangga menjadi kompos.

Permasalahan dalam Pengelolaan Posdaya

Permasalahan dalam pengelolaan Posdaya secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua yakni kendala yang bersifat fisik dan kendala nonfisik.

Kendala fisik cenderung lebih kecil terungkap dibanding masalah non fisik. Tercakup pada kendala fisik adalah keberadaan sekretariat Posdaya yang belum mempunyai tempat khusus, tempat kegiatan usaha produktif (misalnya: aula/workshop), dan ruang belajar siswa PAUD yang belum tersedia. Sekretariat Posdaya umumnya menumpang pada bangunan lain yang biasa digunakan oleh masyarakat atau lembaga lainnya di masyarakat, misalnya di majelis Ta'lim, mushola, rumah pengurus, atau di saung kelompok tani. Jika posdaya mempunyai sekretariat khusus maka kegiatan posdaya akan lebih semarak dan lebih dapat diurus dengan lebih tertib.

Bagi sebagian masyarakat, posdaya dianggap sebagai program pemerintah yang akan membagikan materi tertentu atau membawa proyek tertentu dan masyarakat menjadi sasaran proyek tersebut sebagai tenaga kerja pelaksanaan proyek. Meskipun pemahaman seperti ini tidak banyak muncul, namun hal ini dapat berpengaruh pada pelemahan semangat pengurus posdaya, khususnya bagi posdaya yang kondisi perkembangannya belum baik.

Sebagian pengurus posdaya tersibukkan dengan aktivitas rutin harian yang menyebabkan sulitnya mereka mencurahkan sedikit waktu bagi kegiatan posdaya. Beberapa pengurus posdaya bahkan merasa jenuh mengelola posdaya dengan aktivitas yang monoton, misalnya pengelola usaha keuangan mikro yang menganggap perkembangan usaha yang tidak membawa dampak ekonomi apapun kepada pengelola. Pengelola keuangan tidak mendapat keuntungan ekonomi dan juga tidak mendapatkan honor sedangkan mereka melakukan pembukuan dan juga pelayanan dalam pengumpulan dan pendistribusian simpan pinjam. Kejenuhan juga terjadi pada posdaya yang terlalu sering menjadi objek kunjungan pihak luar. Hal ini disebabkan pola kunjungan yang sudah dipahami oleh posdaya dan program-program persiapan kunjungan yang menyita perhatian dan waktu bagi posdaya.

Ketersediaan jumlah kader menjadi kendala pada Posdaya tertentu. Pemberdayaan dengan filosofi keswadayaan memang memerlukan SDM sukarela dan berjiwa sosial yang tinggi. Posdaya adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat. Oleh karena itu, tidak ada pihak tertentu yang akan menanggung honor pengelola, sementara itu pengurus/kader perlu menyediakan waktu dan tenaga untuk mengelola pemberdayaan masyarakat melalui posdaya, dan sebagian pengurus/kader menaruh harapan adanya honor dari posdaya.

Kendala kualitas SDM juga dirasakan oleh sebagian posdaya dengan kurangnya ide-ide pengembangan kegiatan yang muncul dari pengurus, dan kurangnya inisiatif untuk melakukan konsultasi dan komunikasi dengan pihak luar posdaya untuk menjaring ide-ide dan dukungan pengembangan posdaya.

Selain itu, dukungan pihak luar juga merupakan salah satu penentu keberhasilan posdaya. Pada sebagian posdaya pihak luar belum memberikan dukungan sebagaimana yang diharapkan. Sebagai contoh, sebagian ketua RT belum menunjukkan perhatian untuk mendorong dan membantu perkembangan posdaya, bahkan sebagian mereka belum memahami program posdaya. Bagi aparat desa/kelurahan yang sudah memahami posdaya cenderung hanya memantau posdaya dari jauh, hanya memperhatikan apa yang dilakukan posdaya dan belum mendukung dalam bentuk kehadiran dalam kegiatan posdaya untuk menyemangati

warga, dan belum mensinergikan berbagai program pembangunan desa dengan potensi posdaya. Dukungan masyarakat sekitar utamanya donatur untuk pengembangan kegiatan posdaya yang banyak diperlukan untuk kelancaran program pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lingkungan belum banyak terlihat.

Rencana Program Aksi Pengembangan Posdaya

Berdasarkan analisis potensi dan kinerja posdaya secara umum dapat diidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi, penyebab masalah, potensi dan alternatif pemecahan masalah serta rencana aksi yang dapat dilakukan oleh posdaya dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Analisis identifikasi masalah, faktor penyebab, potensi yang dimiliki, alternatif pemecahan masalah dan rencana aksi dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2.
Identifikasi Masalah dan Alternatif Mengatasi Masalah dalam Pengelolaan Posdaya

No.	Masalah yang Dihadapi	Faktor Penyebab	Potensi yang Dimiliki	Alternatif Mengatasi Masalah	Rencana Aksi
1.	Rendahnya dukungan aparat pemerintah daerah setempat.	• Kurangnya sosialisasi pemahaman konsep Posdaya.	• Posdaya sudah dilegalkan oleh Lurah/ Kepala Desa	• Sosialisasi kontinyu kepada aparat dan tokoh masyarakat.	• Safari Posdaya. • Raker aparat setempat.
2.	Kaderisasi pengurus tidak berjalan dengan baik.	• Sikap apatis dan acuh tak acuh masyarakat. • Kurangnya pelibatan unsur masyarakat.	• Jumlah penduduk potensial yang cukup.	• Penunjukan langsung sebagai kader dari aparat.	• Pertemuan calon-calon kader.
3.	Karakter masyarakat yang sulit diajak maju, terbiasa dengan budaya instan, malas.	• Pola pembangunan yang menjadikan masyarakat lebih banyak sebagai objek pembangunan.	• Banyak tokoh-tokoh kritis dan inovator di antara masyarakat yang apatis.	• Perlu tenaga pendamping Posdaya yang memiliki keterampilan memadai. • Posdaya perlu membuktikan diri dengan prestasi agar masyarakat menjadi percaya.	• Program pendampingan Posdaya oleh mahasiswa. • Memperbanyak jenis kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
4.	Belum memiliki sarana/ fasilitas sebagai pusat aktivitas Posdaya.	• Keterbatasan lahan dan dana.	• <i>Link</i> dengan kelurahan cukup bagus.	• Mencoba memanfaatkan/ mengajukan proposal ke donatur/sumber dana	• Pembangunan sarana/ fasilitas Posdaya.
5.	Dukungan untuk pengembangan Posdaya masih terbatas.	• Kurang sosialisasi. • Adanya anggapan bahwa menyumbang untuk kegiatan non masjid tidak berpahala.	• Legalitas Posdaya melalui SK Kelurahan dan RW.	• Rapat khusus calon-calon donatur secara periodik. • Bermitra dengan lembaga lain.	• Rapat khusus calon-calon donatur. • Membuka jejaring dengan lembaga lain.
6.	Tersendatnya pengembangan UKM yang melibatkan para ibu/wanita.	• Tidak adanya pembinaan kontinyu. • Tidak adanya pendamping. • Modal terbatas	• Banyak para ibu yang sudah memiliki keterampilan usaha. • Pendapatan masyarakat cukup tinggi.	• Perlu pendampingan. • Pengembang usaha.	• Pendampingan UKM Posdaya. • Pelatihan usaha ekonomi produktif.
7.	Tingkat kehidupan ekonomi dan pendidikan masyarakat yang rendah.	• Keterbatasan penguasaan sumber-sumber usaha. • Keterbatasan sarana pendidikan murah.	• Potensi yang belum termanfaatkan. • Pengurus dan kader yang bertanggung jawab.	• Mendirikan sarana pendidikan. • Merekrut tutor/guru PAUD. • Membangun jejaring.	• Pendirian PAUD, madrasah diniyah. • Pelatihan tutor PAUD. • Koordinasi dengan pemda.
8.	Belum semua warga mengenal dan memahami posdaya.	• Sosialisasi belum merata. • Posdaya masih baru berjalan.	• Sosialisasi Posdaya. • Publikasi media massa oleh perguruan tinggi pembina/Pemda.	• Safari Posdaya. • Menjadikan Posdaya sebagai program pemerintah. • Bakti sosial Posdaya.	• Safari Posdaya. • Pelaporan/audiensi ke pucuk pimpinan Pemda. • Bakti sosial Posdaya.

Mengacu pada kinerja dan kendala ketujuh posdaya yang menjadi objek penelitian, serta ide dan rencana pengembangan posdaya yang disampaikan oleh para pengurus posdaya; maka program aksi yang perlu dirumuskan untuk pengembangan posdaya adalah sebagai berikut: (1) pelatihan penyegaran pengurus dan kader posdaya; (2) melakukan resosialisasi posdaya kepada semua pihak mulai dari masyarakat, tokoh masyarakat, aparat desa, aparat kecamatan dan pemerintah daerah; (3) membangun jejaring usaha ekonomi produktif; (4) pelatihan tematik untuk pengembangan kegiatan pendidikan, kesehatan dan lingkungan; (5) melakukan studi banding dan *benchmarking* ke posdaya lain yang sudah maju, dan (6) merintis dan membangun koperasi Posdaya.

Simpulan

Posdaya sebagai model pemberdayaan masyarakat telah memiliki kinerja yang baik karena mampu menghasilkan perubahan positif di masyarakat, baik fisik maupun non fisik. Perubahan tersebut meliputi perubahan pola pikir masyarakat terhadap program dan kegiatan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lingkungan.

Pengelolaan posdaya menghadapi berbagai kendala yang dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yakni kendala yang sifatnya fisik dan kendala non fisik. Kendala fisik terutama terkait dengan keterbatasan atau kekurangan sarana dan fasilitas penunjang kegiatan posdaya. Sedangkan kendala non fisik misalnya pemahaman yang kurang tepat tentang posdaya, kemampuan manajemen pengurus yang masih lemah, kejenuhan pengurus posdaya, kualitas SDM yang masih rendah, dan dukungan pihak luar yang masih kurang.

Berdasarkan analisis kinerja dan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan posdaya, maka dapat dilaksanakan berbagai rencana aksi pengembangan posdaya, antara lain: (1) pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM pengurus/kader; (2) resosialisasi posdaya secara vertikal dan horizontal ke seluruh pihak;

(3) membangun jejaring usaha produktif untuk lebih memacu pertumbuhan usaha ekonomi masyarakat yang baru; (4) pembelajaran dan pemotivasian pengurus/kader Posdaya melalui kegiatan *study banding* dan *bechmarking* ke posdaya yang lain; (5) merintis dan membangun koperasi Posdaya sebagai wadah kegiatan ekonomi masyarakat.

Saran

Dalam rangka pengembangan Posdaya, perlu dilakukan penegasan kembali sasaran dari masing-masing posdaya, penyegaran pengurus dan kader posdaya, melakukan resosialisasi posdaya kepada semua pihak mulai dari masyarakat, tokoh masyarakat, aparat desa, aparat kecamatan dan pemerintah daerah dan membangun jejaring usaha produktif sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Selain itu juga perlu adanya pengembangan dan penguatan kegiatan Posdaya pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lingkungan.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik (2009) Statistik Indonesia. Jakarta: BPS.
- Departemen Sosial (2005) Penduduk Fakir Miskin Indonesia. Jakarta: Depsos.
- Midgley, J (2005) Pembangunan Sosial Perspektif Pembangunan dalam Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Ditperta Islam Depag RI.
- Nanga, M (2006) Dampak Transfer Fiskal terhadap Kemiskinan di Indonesia: Suatu Analisis Simulasi Kebijakan. Disertasi. Tidak Dipublikasikan. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Suharto, E (2005) Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: Refika Aditama.
- Sumarjo & Saharuddin (2004) Metode-Metode Partisipatif dalam Pengembangan Masyarakat. Bogor: Departemen Ilmu-Ilmu Sosial dan Ekonomi Fakultas Pertanian dan Program Pasca Sarjana IPB.
- Suyono, H & Haryanto, R (2007) Buku Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Posdaya. Jakarta: Balai Pustaka.
- World Bank Institut (2002) Dasar-dasar Analisis Kemiskinan. Jakarta: Badan Pusat Statistik.